

2024- APBD-PERTANGGUNGJAWABAN

2025

PERDA KOTA PADANG NO. 7, LD 2025/NO. 7, TLD. NO. 150, HLD KOTA PADANG HLM 67-75.

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NO.7 TAHUN 2025 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK

- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Dasar hukum peraturan ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 1 Tahun 2022, PP No. 17 Tahun 2010, PP Nomor 71 Tahun 2010, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Perda Kota Padang No. 4 Tahun 2023, Perda Kota Padang No. 9 Tahun 2024
- Dalam peraturan ini diatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 merupakan wujud dari akuntabilitas transparansi dari pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah selama satu tahun yang disusun oleh Kepala Daerah sebagai perwakilan pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai wakil rakyat. diatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan, yang memuat : laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan

CATATAN

- Peraturan daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan 29 Juli 2025.
- Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai rincian lebih lanjut pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur dengan peraturan wali kota
- Penjelasan 2 hlm.